

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan secara berkelanjutan terhadap kegiatan perekonomian suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan ini dapat dilihat melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi faktor inflasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi dan pendapatan nasional dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya menunjukkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku.

PDB merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. PDB mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah negara selama periode tertentu, biasanya setahun. PDB membantu menilai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan produktivitas nasional, serta menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi ekonomi dan untuk perbandingan antar negara dalam konteks ekonomi global (Sujianto *et al.*, 2024). PDB yang tinggi umumnya mencerminkan aktivitas ekonomi yang kuat, lapangan kerja yang meningkat, dan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat. Sebaliknya, PDB yang rendah dapat mengindikasikan masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, atau defisit anggaran.

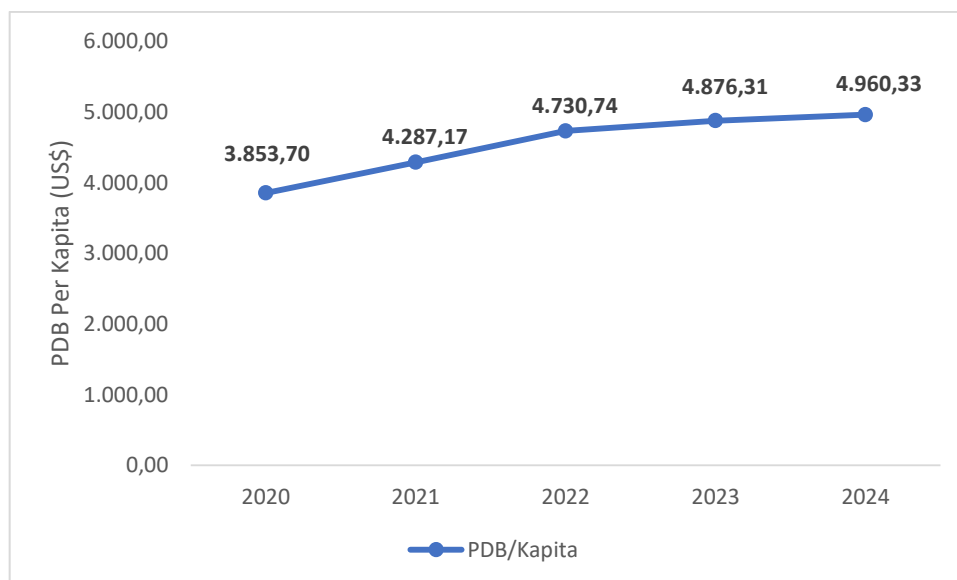
PDB terbagi atas 2, yaitu Atas Dasar Harga berlaku (ADHB), dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDB Atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Sementara itu, PDB Atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga dari tahun tertentu yang ditetapkan sebagai tahun dasar (BPS Indonesia, 2023).

Menurut Mankiw (2007), PDB per kapita ialah alat untuk mengukur rata-rata nilai ekonomi yang dihasilkan per orang di suatu negara dalam periode waktu tertentu. PDB per kapita dihitung dengan membagi total nilai barang dan jasa yang diproduksi (PDB) dengan jumlah penduduk. Jika PDB per kapita mengalami kenaikan maka dapat dikatakan perekonomian negara tersebut dalam kondisi baik. PDB per kapita, yang dihitung dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk, memberikan gambaran umum tentang tingkat kemakmuran suatu negara. Selain itu, PDB dan PDB per kapita dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan sosial masyarakat, dan produktivitas suatu negara dapat disimpulkan dari data PDB per kapita (Rahardja, 2008).

Indonesia telah kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Pertumbuhan ekonomi yang kuat sebesar 5,3% pada tahun 2022 mendorong kenaikan PDB per kapita sehingga Indonesia berhasil masuk kembali ke dalam kategori ini. Pada tahun 2022, pendapatan per kapita Indonesia tercatat sebesar US\$ 4.730,74, jumlah itu masuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan

menengah ke atas *upper middle income*, yang berkisar antara US\$ 4.256 hingga US\$ 13.025.

Indonesia mencapai status pendapatan menengah atas sejak tahun 2019, namun pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan ke kategori menengah bawah selama dua tahun. Untungnya Indonesia kemudian berhasil bangkit kembali. Sebelumnya, dari tahun 2012 hingga 2018, PDB per kapita Indonesia berada di kisaran US\$ 3.000-3.860, yang termasuk dalam kategori pendapatan menengah ke bawah. Pada tahun 2019, PDB per kapita naik menjadi US\$ 4.106, melampaui ambang batas US\$ 4.045, sehingga Indonesia masuk ke kategori *upper middle income*. Setelah sempat menurun, Indonesia kembali meraih status negara berpenghasilan menengah ke atas pada tahun 2022 (Kemenkeu, 2023). Dalam lima tahun PDB per kapita Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita di Indonesia Tahun 2020-2024 (US\$)

Sumber: World Bank, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa PDB per kapita di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024 terus meningkat. Pada tahun 2020 PDB per kapita sebesar US\$ 3.853 akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan Indonesia turun ke kategori negara berpenghasilan menengah ke bawah, juga berdampak pada kontraksi ekonomi, penurunan pendapatan perkapita dan pelemahan nilai tukar rupiah (BKF Kemenkeu, 2021).

Tahun 2021 sebesar US\$ 4.287 upaya Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah melindungi masyarakat yang rentan serta menstimulasi sektor usaha untuk kembali tumbuh positif, pemotongan bunga kredit pinjaman untuk pelaku usaha UMKM telah dilakukan. Program ini dianggap berhasil karena PDB per kapita pada tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan, ini menunjukkan pemulihan ekonomi seperti sebelum pandemi Covid-19 (DJKN, 2023). Akan tetapi peningkatan PDB per kapita tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor seperti inflasi dan fluktuasi nilai tukar mata uang juga dapat memengaruhi PDB, sehingga harus diperhatikan saat menganalisis dampak PDB terhadap perekonomian.

Menurut Mankiw (2020), salah satu komponen utama dalam menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita adalah investasi. Investasi merupakan salah satu variabel yang mampu menjelaskan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam perhitungan pendapatan nasional metode pengeluaran, investasi juga merupakan salah satu komponen pendapatan nasional. Jadi, dapat dikatakan

investasi merupakan suatu persamaan identitas dari pertumbuhan ekonomi (Harwijaya, 2020).

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara negara maju, baik di kawasan regional maupun global, Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut (Defarahmi *et al.*, 2017). Selain berupaya menggali sumber pembiayaan dari dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber untuk mendapatkan pembiayaan dari luar negeri, salah satunya adalah Penanaman Modal Asing (PMA).

PMA merupakan kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh investor asing dari satu negara ke negara lain, yang berupa pembelian aset, pembangunan, atau akuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia ditetapkan lewat Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. PMA dalam Undang-Undang ini yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah republik Indoneisa yang dilakukan dengan menanamkan modal asing di Indonesia, baik melakukan penanaman modal asing seutuhnya atau secara bersama-sama dengan penanaman modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Tujuan PMA yaitu memanfaatkan potensi pasar, tenaga kerja, atau sumber daya alam yang dimiliki negara penerima investasi. Penanaman Modal Asing menjadi salah satu sumber pembiayaan yang

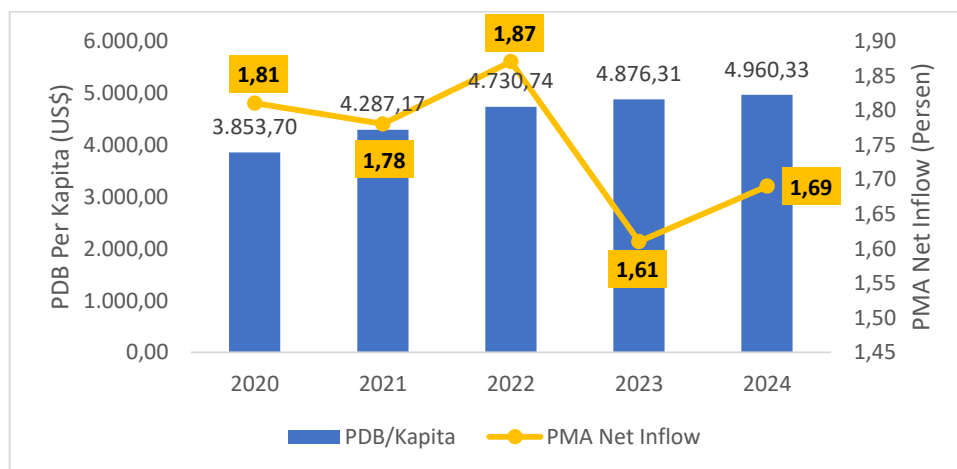
penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan.

PMA memegang peran penting dalam PDB Indonesia dan memperkuat hubungan bisnis internasional, PMA dinilai lebih efektif dalam mendorong PDB. Perekonomian suatu negara bergantung pada investasi dalam menyelesaikan beberapa masalah ekonomi, krisis dan tantangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan standar hidup, dan lain-lain (Dewi, 2024).

PMA yang digunakan dalam penelitian ini adalah *PMA net nflow* yang bersumber dari *World Bank*. *PMA net inflow* disini adalah persentase arus masuk bersih dari investasi asing langsung ke Indonesia terhadap PDB dalam satu periode waktu tertentu. *Net inflow* menggambarkan jumlah PMA yang benar-benar masuk dan tetap berada dalam negeri, setelah dikurangi dengan arus keluar atau pencabutan investasi oleh investor asing. Dengan kata lain, net inflow memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kontribusi riil PMA terhadap perekonomian nasional.

PMA cenderung meningkat dari tahun 2010 hingga 2019, dengan pengecualian pada tahun 2018, disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketegangan akibat perang dagang Tiongkok dan kebijakan moneter yang lebih ketat di Amerika Serikat, yang mengakibatkan arus modal keluar dari negara-negara berkembang. sektor manufaktur atau industri pengolahan menarik investasi asing langsung PMA paling besar, dengan nilai kumulatif mencapai (US\$112,2

miliar). Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur menjadi tujuan utama investasi asing. Setelah manufaktur, sektor jasa (US\$100,9 miliar) dan sektor pertambangan (US\$36 miliar) menjadi sektor-sektor yang juga menarik minat investor asing (DPR-RI, 2020). Perkembangan PMA *Net Inflow* Indonesia dan PDB Per Kapita Indonesia tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 2 PMA *Net Inflow* dan PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber : World Bank, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020-2024 persentase PMA *net inflow* di Indonesia mengalami fluktuasi. Tahun 2020 persentase PMA *net inflow* terhadap PDB per kapita sebesar 1,81% dan menurun pada tahun 2021 sebesar 1,79%, disebabkan karena adanya wabah Covid-19 yang membuat lemah perekonomian global, nilai PMA terhadap PDB per kapita di Indonesia (DJKN, 2023). Meskipun nilai PMA menurun sebagai dampak dari krisis global akibat COVID-19, faktor-faktor lain seperti ekspor, belanja pemerintah, dan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil membuat PDB per kapita Indonesia tetap mengalami peningkatan pada tahun tersebut.

Tahun 2022 pemerintah mulai melakukan pemulihan ekonomi, pada tahun ini ekonomi global juga sudah mulai membaik, kontribusi PMA terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,873% . Menurut laporan dari *United Nation Conference Trade And Development* (UNCTAD) Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang menerima PMA terbanyak setelah Singapura.

United Nation Conference Trade And Development (UNCTAD) dalam *Investment Trend Monitor*, mencatat PMA ke Asia Tenggara pada tahun 2023 turun drastis. Realisasi tersebut merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Penurunan PMA dipicu oleh terganggunya aliran modal asing ke negara-negara yang selama ini menjadi pusat investasi dunia, seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam (BKPM, 2021). Meskipun PMA terjadi penurunan, PDB Per Kapita mengalami peningkatan sebesar US\$ 4.876 dikarenakan sektor-sektor domestik seperti konsumsi rumah tangga dan layanan dapat tetap tumbuh.

Tahun 2024 meningkat kembali disebabkan oleh kombinasi implementasi kebijakan pro-investasi, realisasi proyek hilirisasi industri, dan stabilitas ekonomi makro yang memperkuat kepercayaan investor asing sehingga meningkatkan PMA terhadap PDB (Asworo *et al.*, 2024). PMA sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, PMA mendatangkan modal, teknologi dan menciptakan lapangan kerja, dengan adanya sektor-sektor tersebut bisa menjadi motor pertumbuhan baru.

Menurut Mankiw (2020), salah satu faktor yang mempengaruhi PDB per kapita adalah inflasi, karena inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sehingga memengaruhi PDB per kapita. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi adalah dilihat dari keberhasilan dalam menanggulangi inflasi. Inflasi merupakan permasalahan ekonomi yang tidak bisa diabaikan karena inflasi akan menimbulkan dampak yang sangat luas seperti terjadinya pengangguran, meningkatnya harga-harga dan masih banyak dampak lainnya yang diakibatkan dengan adanya inflasi (Sasli, 2012). Meningkatnya harga-harga yang dimaksud adalah besarnya tingkat inflasi dapat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan di samping itu inflasi dapat berdampak secara langsung terhadap pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Inflasi dipandang sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi PDB suatu negara. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama pada pendapatan riil masyarakat (Septiatin *et al.*, 2020). Ketika inflasi meningkat maka akan mengakibatkan kenaikan harga pada hampir seluruh barang yang ada di suatu negara. Kenaikan harga barang tersebut akan mengurungkan minat investor untuk berinvestasi pada saat tingkat inflasi cenderung rendah dan stabil (Dewi *et al.*, 2013).

Tingginya inflasi yang terjadi akan menghambat dalam pembangunan ekonomi dan aktivitas perekonomian pada masyarakat sehingga memperlambat

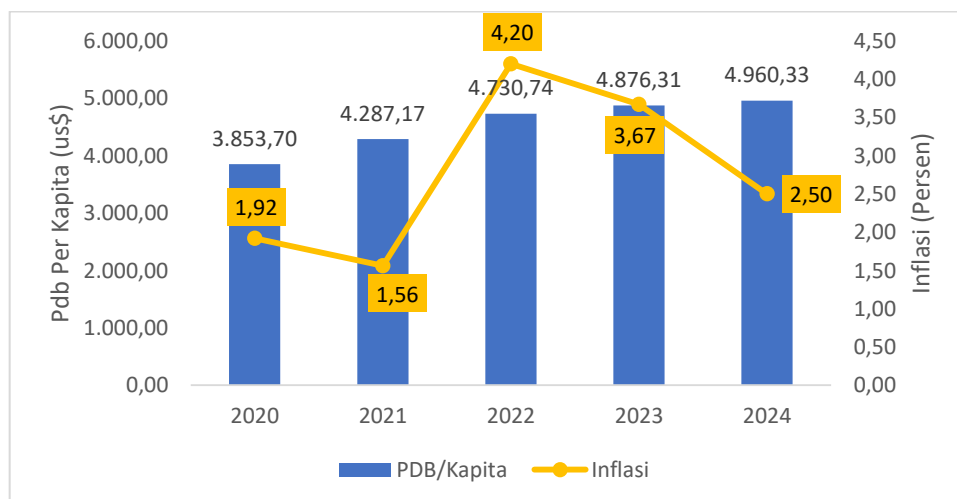
kegiatan perekonomian dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sejumlah teori mengemukakan tentang gejala inflasi (Mahzalena *et al.*, 2019). Menurut pandangan monetaris penyebab utama inflasi adalah kelebihan penawaran uang dibandingkan yang diminta oleh masyarakat. Sedangkan golongan non moneteris, yaitu keynesian tidak menyangkal pendapat pandangan monetaris tetapi menambahkan bahwa tanpa ekspansi uang beredar, kelebihan permintaan agregat dapat saja terjadi jika terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor netto. Dengan demikian inflasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor moneter dan non moneter (Hasiru *et al.*, 2019).

Salah satu ciri utama inflasi di Indonesia adalah dominasi faktor dari sisi pasokan. Gangguan pasokan, baik karena kondisi cuaca, bencana alam, maupun keterbatasan distribusi logistik, seringkali menyebabkan lonjakan harga, terutama pada sektor bahan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia bersifat sangat sensitif terhadap kondisi eksternal, khususnya pada sektor pertanian dan energi (mardiyanto, 2023).

Inflasi di Indonesia juga menunjukkan pola musiman yang cukup jelas. Setiap tahun, inflasi cenderung meningkat menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, saat permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa naik secara signifikan. Lonjakan permintaan yang tidak selalu diimbangi oleh peningkatan pasokan menjadi penyebab utama kenaikan harga pada periode tersebut (kompasiana, 2025). Dari sisi komponen, inflasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua kelompok utama, yaitu kelompok *volatile food* dan *administered prices*. *Volatile food* mencakup bahan pangan segar seperti beras, cabai, bawang, dan daging,

yang harganya mudah berfluktuasi akibat faktor musiman dan cuaca. Sementara itu, *administered prices* adalah harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah, seperti tarif listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan tarif angkutan umum. Kenaikan pada salah satu dari kedua kelompok ini hampir selalu berdampak langsung terhadap tingkat inflasi nasional (mardiyanto, 2023).

Sementara inflasi *volatile food* dan *administered prices* cenderung tidak stabil, inflasi inti atau *core inflation* di Indonesia cenderung lebih stabil dari waktu ke waktu. Inflasi inti mencerminkan tekanan inflasi jangka panjang yang lebih permanen, dan umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan domestik serta ekspektasi harga. Oleh karena itu, Bank Indonesia menggunakan inflasi inti sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter (KKBP-RI, 2025). Perkembangan Inflasi Indonesia dan PDB Per Kapita Indonesia tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 3 Inflasi dan PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2020-2024
 Sumber: World Bank, 2025

Berdasarkan Grafik 1.3 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi lima tahun terakhir di tahun 2020-2024 di Indonesia mengalami cenderung tidak

stabil, dilihat pada gambar bahwa inflasi Indonesia tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,209%. Pada tahun 2020 inflasi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,921%, terus menurun di tahun 2021 mencapai 1,560%. Inflasi yang rendah dikarenakan penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19. Inflasi tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu di tahun 2022 terkait pasca pemulihan Covid-19 dan ini menyebabkan gangguan suplai dan harga tidak siap sehingga memicu kenaikan harga, selain itu juga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi (Wuryandani, 2022). Namun, ekonomi justru sedang dalam fase pemulihan dari pandemi. Banyak sektor yang mulai pulih dan memproduksi kembali, sehingga PDB secara total naik.

Tahun 2023 inflasi di Indonesia menunjukkan penurunan menjadi sekitar 3,67%. Penurunan ini mencerminkan usaha pemerintah dan Bank Indonesia untuk menstabilkan harga, meskipun dampak inflasi tinggi dari tahun sebelumnya masih dirasakan. Meskipun daya beli masyarakat mulai membaik seiring dengan penurunan inflasi, ketidakpastian global dan fluktuasi harga komoditas tetap memengaruhi iklim investasi. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi juga memperlambat investasi dan konsumsi. Kenaikan suku bunga bertujuan untuk menstabilkan inflasi, tetapi di sisi lain meningkatkan biaya pinjaman bagi pelaku usaha dan konsumen, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. (Putri, 2024).

Tahun 2024 berada dalam 2,50%. Penurunan ini diharapkan memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi yang lebih stabil. Inflasi yang terkendali menunjukkan stabilitas ekonomi makro. Ini penting agar investor percaya dan

masyarakat memiliki daya beli yang stabil. Inflasi tinggi dapat menggerus daya beli dan menurunkan kualitas hidup, sehingga memperparah kesenjangan dan memperlambat transaksi menuju negara maju. (Dewi *et al.*, 2013)

Menurut Okun dalam Dwi dan Hendarto (2023) pengangguran juga sangat berpengaruh terhadap PDB. Kemampuan suatu negara untuk tumbuh secara ekonomi sangat dipengaruhi oleh masalah pengangguran di bidang sosial dan ekonomi. Pengangguran dapat dilihat dari kondisi suatu negara apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran.

Pengangguran dapat terjadi sebab akibat dari pada tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Negara berkembang tidak terlepas dari permasalahan pokok yang sering dialami oleh banyak negara yaitu masalah ketenagakerjaan seperti pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja, bentuk pengangguran dan upah yang diterima tenaga kerja.

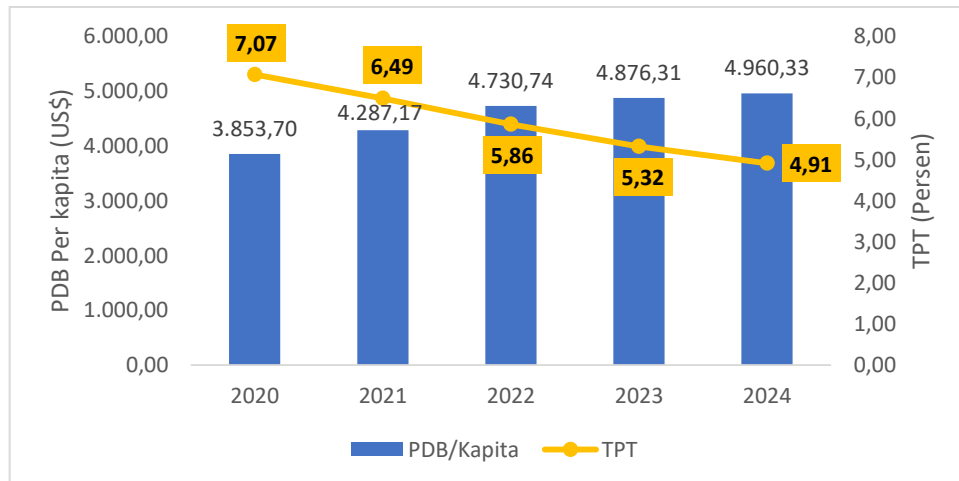
Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan PDB per kapita menurun. Hal ini disebabkan karena pengangguran dapat mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat, mendorong masyarakat jatuh kedalam kemiskinan, menimbulkan masalah sosial lainnya. Sebaliknya, peningkatan PDB per kapita umumnya menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat, yang berarti masyarakat memiliki lebih banyak akses terhadap barang dan jasa,

serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih baik (Buswari *et al.*, 2023).

Salah satu permasalahan ekonomi makro yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengangguran. Dalam konteks ini, pengangguran diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menurut (BPS, 2021) TPT merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di antara penduduk usia kerja yang siap kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Adapun angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu (pada masa referensi survei) mempunyai pekerjaan, baik yang memang melakukan aktivitas bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena satu dan lain hal seperti sedang cuti, menunggu panen, atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya.

Semasa pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi mampu menambahkan banyak pekerjaan baru di Indonesia dan mengurangi angka pengangguran nasional, terutama melalui peningkatan tenaga kerja di sektor industri dan jasa, meskipun sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi, namun, Krisis Keuangan Asia (Krismon) pada akhir 1990-an merusak pembangunan tersebut, menyebabkan lonjakan pengangguran hingga lebih dari 20 persen serta peningkatan *underemployment*, di mana banyak pekerja urban yang kehilangan pekerjaan akhirnya pindah ke pedesaan dan masuk ke sektor informal seperti pertanian; meskipun begitu, secara umum angka pengangguran di Indonesia telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, walau

tantangan tetap ada, khususnya dalam hal kesenjangan keterampilan dan struktur pasar kerja (Vander 2025). Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan PDB Per Kapita Indonesia tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia , 2025

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas dapat dilihat dari periode 2020-2024 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terus menurun. Tahun 2020 sebesar 7,07% dan tahun 2024 sebesar 4,91% tingkat pengangguran mengalami penurunan, penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dengan lebih banyak lapangan kerja kembali tersedia. Kebijakan ekonomi dan program pemerintah dapat membantu dalam menekan angka pengangguran. Jika tren ini berlanjut, maka pengangguran dapat terus menurun seiring pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan inefisiensi pasar tenaga kerja. Indonesia harus meningkatkan kualitas tenaga kerja (*skill-upgrading*) dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif. Pengangguran yang rendah

dengan produktivitas tinggi akan mendorong pertumbuhan PDB per kapita yang berkelanjutan. (BPS 2020).

Sejauh ini telah dilakukan sejumlah penelitian yang menganalisis pengaruh PMA, inflasi dan pengangguran terhadap PDB per kapita. Penelitian-penelitian dilakukan dalam tahun yang berbeda-beda dan tempat penelitian yang berbeda. Penelitian Haiyun (2017) menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing di Sri Lanka berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB per kapita. Penelitian Dwyer (2019) menunjukan bahwa *Foreign Direct Investment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB per kapita di beberapa negara ASEAN. Penelitian Khair dan Rusydi (2016) Penanaman Modal Asing (PMA) berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.

Penelitian Murtala (2014) menunjukan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDB perkapita di Indonesia tahun 1996-2022. Penelitian Fajri (2020) menunjukan Inflasi tidak menunjukan pengaruh kepada GDP Per Kapita di negara anggota G20. Penelitian Habibi *et al* (2023) terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara inflasi terhadap PDB per kapita tahun 2010-2021.

Penelitian Hendrasah dan Harjunawati (2020) menunjukan pengangguran terdapat pengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto. Inflasi tidak terdapat pengaruh terhadap produk domestik bruto. Penelitian Nugroho *et al.*, (2023) menunjukan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap GDP per kapita di Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya manujukan hasil yang berbeda menyangkut pengaruh PMA, inflasi dan pengangguran terhadap PDB per kapita. Penelitian ini menggabungkan variabel PMA, inflasi dan pengangguran sebagai variabel bebas dan melihat pengaruhnya terhadap PDB per kapita sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh PMA terhadap PDB per kapita di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap PDB per kapita di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh pengangguran terhadap PDB per kapita di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh PMA, inflasi dan pengangguran terhadap PDB per kapita di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PMA terhadap PDB per kapita di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap PDB per kapita di Indonesia
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengangguran terhadap PDB per kapita di Indonesia

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PMA, inflasi dan pengangguran terhadap PDB perkapita

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi pembangunan, tentang pengaruh PMA, inflasi, pengangguran dan PDB per kapita di Indonesia.
 - b. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan PMA, inflasi, pengangguran dan PDB per kapita.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan peningkatan PDB per kapita.
 - b. Bagi pengusaha dan masyarakat, sebagai tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan PMA, inflasi, pengangguran dan PDB per kapita.